

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di Indonesia menerapkan prinsip desentralisasi yang memberikan otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sistem ini, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memegang peran krusial sebagai lembaga legislatif yang memiliki tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah. Peran DPRD diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

Tabel 1.1
Perubahan Kewenangan DPRD Sebelum dan Sesudah Reformasi

Aspek	Sebelum Reformasi	Pasca - Reformasi
Legislasi	Terbatas, mengikuti kebijakan pusat	Memiliki kewenangan legislasi daerah secara mandiri
Pengawasan	Lemah, tunduk pada kebijakan pusat	Dapat mengawasi kebijakan eksekutif daerah
Anggaran	Ditentukan oleh pemerintah pusat	DPRD berperan dalam pembahasan dan pengawasan anggaran daerah
Relasi dengan Eksekutif	Eksekutif sangat dominan	Lebih seimbang, tetapi masih dipengaruhi politik kepentingan

Sumber: Perdana et al. (2024), Nugraha (2017), UU No. 23 Tahun 2014

Sebagai lembaga legislatif daerah, DPRD mengalami perubahan dominan setelah era reformasi. Jika sebelumnya lembaga ini lebih berperan sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, kini DPRD memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menyusun peraturan daerah, mengawasi kebijakan eksekutif, serta mengalokasikan anggaran daerah secara mandiri (Abqa & Rohman, 2023). Meski otonomi daerah diharapkan dapat

meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang lebih demokratis dan partisipatif, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi masih menghadapi berbagai kendala.

Tabel 1.2
Perbandingan Anggota Fraksi Komisi II

Nama Fraksi	Periode 2019 - 2024	Periode 2024 - 2029
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P)	3	3
Fraksi Partai Gerindra Indonesia Raya (Gerindra)	3	4
Partai Golongan Karya (Golkar)	3	4
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	2	2
Fraksi Partai Amanat Nasional	1	1
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	1	1
Fraksi Partai Keadilan Sosial (PKS)	3	3
Fraksi Partai Nasional Demokrat (NasDem)	1	1
Fraksi Partai Demokrat	1	1
Total Anggota	19	19

Sumber: dprd.jabarprov.go.id (diolah peneliti,2025)

Berdasarkan tabel di atas, jumlah anggota pada beberapa fraksi mengalami perubahan. Fraksi Partai Gerindra mengalami peningkatan jumlah anggota dari 3 menjadi 4, sementara Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) juga mengalami peningkatan anggota dari 3 menjadi 4. Fraksi lainnya tetap memiliki jumlah anggota yang sama seperti pada periode sebelumnya.

Dinamika ini menjadi penting dalam menganalisis bagaimana struktur keanggotaan mempengaruhi efisiensi, independensi, dan transparansi dalam kebijakan yang dihasilkan oleh Komisi II DPRD Jawa Barat.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh (Ramadhana, Soeyoso Putro, Darto Miradia, & Dra Neneng Weti Isnawaty, 2022) mengungkapkan bahwa dinamika politik internal DPRD sering kali berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan. Secara ideal, DPRD harus menjadi garda terdepan dalam memastikan bahwa kebijakan daerah berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Selain itu, studi dari (Negara, 2024) menunjukkan bahwa lebih dari 60% anggota DPRD memiliki hubungan erat dengan partai politik atau kelompok bisnis tertentu, yang berpotensi mengurangi independensi dalam pengambilan keputusan. Kondisi ini berimplikasi pada kecenderungan kebijakan yang lebih mengakomodasi kepentingan elit politik dibandingkan dengan kebutuhan masyarakat. Transformasi dalam sistem pemerintahan daerah juga berdampak pada dinamika politik di DPRD, sehingga banyak kebijakan yang dihasilkan merupakan hasil kompromi politik antara DPRD dan kepala daerah, bukan berdasarkan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam konteks ini, Komisi II DPRD Jawa Barat menjadi lokus yang menarik untuk dikaji karena dinamika politik internal di dalamnya berperan besar dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam isu-isu strategis terkait administrasi pemerintahan, keuangan daerah, dan pengelolaan aset. Sebagai komisi yang menangani sektor ekonomi dan kepegawaian, Komisi II memiliki posisi krusial dalam menentukan arah kebijakan daerah. Namun, kewenangan ini juga membuka ruang bagi tarik-menarik kepentingan politik yang kerap mempengaruhi substansi kebijakan yang dihasilkan.

Dalam dinamika ini, penting untuk menelaah bagaimana Komisi II DPRD, Jawa Barat, menjalankan perannya dalam penyusunan kebijakan daerah. Komisi II, yang memiliki tanggung jawab dalam bidang ekonomi, keuangan, dan kepegawaian, memegang peranan strategis dalam menentukan arah kebijakan daerah. Namun, dalam praktiknya, sering kali keputusan yang diambil dipengaruhi oleh kepentingan politik internal yang berimplikasi pada efektivitas pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh bagaimana faktor politik internal dalam Komisi II DPRD Jawa Barat mempengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan.

Tabel 1.3
Peran Komisi II DPRD Jawa Barat dalam Penyusunan Kebijakan Daerah

Bidang Kebijakan	Tanggungjawab Komisi II	Tantangan dalam implementasi
Kepegawaian & ASN	Menyusun regulasi terkait ASN & rekrutmen daerah	Intervensi politik dalam pengangkatan pejabat

Aset Daerah	Mengawasi pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah	Lemahnya transparansi dalam pengelolaan aset
Keuangan Daerah	Mengawasi alokasi dan penggunaan anggaran daerah	Ketidaksesuaian antara anggaran dan realisasi kebijakan
Pelayanan Publik	Membantu penyusunan kebijakan administrasi pelayanan publik	Ketidakseimbangan dalam distribusi layanan antarwilayah

Sumber: Nugraha (2017), Perdana et al. (2024), Kemendagri (2022).

Dari tabel di atas, dapat terlihat bahwa meskipun Komisi II DPRD memiliki kewenangan yang cukup luas dalam bidang kepegawaian, pengelolaan aset daerah, serta keuangan daerah, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kebijakan yang dihasilkan.

Berangkat dari kondisi ini, penelitian mengenai dinamika politik internal dalam Komisi II DPRD Jawa Barat menjadi semakin relevan untuk dilakukan. Dengan memahami bagaimana proses menyusun kebijakan serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai dinamika internal politik yang mempengaruhi pengambilan keputusan.

Penelitian mengenai dinamika politik internal dalam Komisi II DPRD Jawa Barat menjadi semakin penting mengingat kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, dinamika politik internal DPRD tidak hanya dipengaruhi oleh interaksi antarfraksi dan hubungan dengan eksekutif, tetapi juga oleh berbagai kepentingan individu serta kelompok yang dapat mempengaruhi kebijakan yang dihasilkan. Meskipun secara normatif anggota DPRD berfungsi sebagai wakil rakyat yang seharusnya mengutamakan kepentingan publik, realitas politik di lapangan menunjukkan

bahwa keputusan legislatif sering kali lebih dipengaruhi oleh motif pribadi, aspirasi politik individu, atau hubungan dengan kelompok tertentu (Nastain & Nugroho, 2022).

Dalam beberapa kasus, konflik kepentingan ini berdampak langsung terhadap kualitas kebijakan yang dihasilkan oleh Komisi II. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh (Atmojo, 2024) menemukan bahwa lebih dari 40% kebijakan daerah yang dirancang mengalami revisi dominan atau bahkan dibatalkan karena adanya intervensi kepentingan politik dan ekonomi yang dominan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan yang awalnya bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola daerah sering kali berubah orientasi akibat tekanan dari kelompok kepentingan tertentu.

Sebuah studi yang dilakukan oleh (Syamsuadi & Yahya, 2018) menunjukkan bahwa dalam banyak kasus, ketua komisi yang memiliki kedekatan dengan kepala daerah atau partai politik tertentu cenderung lebih berpihak pada kepentingan eksekutif dibandingkan pada fungsi pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan dalam DPRD harus memiliki keseimbangan antara menjaga stabilitas politik dan menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan yang diajukan oleh eksekutif.

Menurut laporan yang dirilis oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) pada tahun 2022, sekitar 38% kebijakan daerah yang dihasilkan pembuat kebijakan menunjukkan indikasi kuat adanya praktik transaksional. Jika kondisi ini terus berlanjut, masyarakat akan semakin skeptis terhadap pembuat kebijakan, dan partisipasi publik dalam proses legislasi akan semakin rendah. Hal ini dapat mengarah pada lemahnya kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah daerah, yang pada kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Administrasi publik sebagai disiplin ilmu tidak hanya membahas aspek manajerial dalam birokrasi pemerintahan, tetapi juga mencakup bagaimana kebijakan publik dirumuskan dan diimplementasikan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Dalam konteks ini, peran Komisi II DPRD dalam penyusunan kebijakan daerah memiliki keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip administrasi publik, khususnya dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan daerah (Sukoco, n.d.). Kebijakan yang dihasilkan oleh Komisi II, seperti regulasi terkait kepegawaian daerah, pengelolaan aset publik, serta administrasi pemerintahan, akan berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat daerah.

Urgensi Penelitian ini berupaya memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas legislasi daerah dengan mengkaji lebih dalam faktor struktural dan kepemimpinan yang

mempengaruhi efektivitas kebijakan yang dihasilkan oleh Komisi II DPRD Jawa Barat. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi konkret dalam meningkatkan kualitas kebijakan daerah serta memperkuat prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah (Putra, Sumadinata, & Paskarina, 2022).

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana peran struktur fraksi dalam tahap *intelligence* terhadap pengambilan keputusan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ?
2. Bagaimana fungsi kepemimpinan dalam tahap *choice* terhadap pengambilan keputusan Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat ?
3. Bagaimana kepentingan individu dalam tahap *design* di Komisi II DPRD Jawa Barat berimplikasi pada proses pengambilan keputusan ?
4. Bagaimana tahapan proses pengambilan keputusan berlangsung di Komisi II DPRD Jawa Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dinamika politik internal dalam pengambilan keputusan di Komisi II DPRD Jawa Barat

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan dalam mengelola dinamika politik internal Komisi II, yang memengaruhi pengambilan keputusan. Pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh struktur fraksi, kepemimpinan, dan konflik kepentingan dapat membantu dalam merancang strategi yang lebih efektif untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan proses pengambilannya lebih efisien dan transparan.

2. Manfaat Akademis

Secara Akademis penelitian ini memperkaya literatur tentang pengambilan keputusan dalam konteks administrasi publik, dengan menyoroti peran dinamika politik internal sebagai faktor penting dalam pembuatan kebijakan. Penelitian ini juga

menyajikan data empiris yang dapat digunakan untuk memperdalam studi lebih lanjut mengenai pengaruh struktur organisasi legislatif terhadap kinerja kebijakan publik. Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori administrasi publik, tetapi juga menyediakan dasar untuk penelitian lebih lanjut mengenai strategi peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses legislasi di Indonesia.

E. Kerangka Berpikir

Grand theory pada penelitian ini diambil dari konsep administrasi publik. Administrasi publik merupakan disiplin ilmu yang membahas pengelolaan sistem pemerintahan, kebijakan publik, serta mekanisme pelayanan publik dalam konteks negara modern (Siagian, 2017). Dalam sistem desentralisasi yang dianut Indonesia, administrasi publik menjadi landasan utama bagi keberjalanan pemerintahan daerah, termasuk dalam fungsi DPRD sebagai badan legislatif daerah.

Dalam konteks penelitian ini, administrasi publik membantu memahami bagaimana struktur DPRD, khususnya Komisi II, bekerja dalam menyusun kebijakan ekonomi dan keuangan daerah. Dengan prinsip *good governance*, diharapkan DPRD dapat menghasilkan kebijakan yang berorientasi pada kepentingan publik, namun kenyataannya sering terjadi dominasi kepentingan politik dalam proses legislasi (Dunn, 2016).

Sehingga *Middle Theory* dalam penelitian ini adalah teori organisasi publik (Frederickson, 1997), yang menekankan bagaimana struktur, budaya organisasi, dan hubungan antaraktor dalam sebuah institusi publik mempengaruhi efektivitas administrasi dan kebijakan yang dihasilkan. Dalam praktiknya, dinamika politik internal dalam Komisi II DPRD Jawa Barat tidak terlepas dari struktur fraksi, gaya kepemimpinan, serta interaksi antara aktor politik yang ada. Struktur organisasi dan budaya politik di dalamnya dapat membentuk pola pengambilan keputusan yang sering kali lebih dipengaruhi oleh kompromi politik dibandingkan dengan kajian teknokratis.

Selanjutnya, *Applied Theory* yang digunakan yaitu pengambilan keputusan. Dalam konteks penelitian ini, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana anggota Komisi II DPRD Jawa Barat membuat keputusan kebijakan, terutama dalam menghadapi tekanan dari berbagai kepentingan politik internal (George R. Terry, 2005).

Untuk menganalisis dan memahami secara lebih mendalam bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan.(George R. Terry, 2005) mengembangkan teori pengambilan keputusan dengan empat tahap utama:

- a) *Intelligence*: Mengidentifikasi masalah yang muncul dalam organisasi atau lembaga.
- b) *Design*: Mengembangkan berbagai alternatif solusi yang dapat diterapkan.
- c) *Choice*: Memilih solusi yang paling efektif berdasarkan pertimbangan rasional dan politis.
- d) *Implementation*: Menerapkan keputusan yang telah dipilih serta mengevaluasi dampaknya.

Oleh karena itu, penulis membuat tabel kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan variabel terkait dengan masalah penelitian beserta teorinya, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4
Tingkatan Teori

Tingkatan Teori	Nama Teori	Penjelasan	Dimensi	Relevansi dengan penelitian
Grand Theory	Administrasi Publik	Administrasi publik membahas bagaimana pemerintah merancang, mengelola, dan mengevaluasi kebijakan serta program publik untuk mencapai tujuan bersama.	-	Teori ini menjadi fondasi utama penelitian dalam melihat bagaimana dinamika internal Komisi II DPRD Jawa Barat mempengaruhi proses administrasi dan pengambilan keputusan kebijakan publik.

Middle Theory	Teori Organisasi Publik (Frederickson, 1997)	Teori organisasi publik menekankan bagaimana struktur, budaya organisasi, dan hubungan antaraktor dalam sebuah institusi publik mempengaruhi efektivitas administrasi dan kebijakan yang dihasilkan.	1. Struktur organisasi 2. Budaya organisasi 3. Hubungan antaraktor	Relevan dalam memahami bagaimana kebijakan yang dihasilkan Komisi II DPRD Jawa Barat dipengaruhi oleh kepentingan politik internal dan faktor struktural.
Applied Theory	Pengambilan Keputusan (George R. Terry, 2005)	Teori ini menjelaskan bagaimana individu atau kelompok membuat keputusan berdasarkan berbagai faktor, baik rasional maupun emosional.	1. Pengenalan masalah (<i>Intelligence Activity</i>) 2. Perumusan Alternatif (<i>Design Activity</i>) 3. Evaluasi dan Pemilihan Alternatif (<i>Choice Activity</i>)	Membantu menganalisis bagaimana keputusan di Komisi II DPRD Jawa Barat dibuat, termasuk bagaimana faktor kepemimpinan dan dinamika internal memengaruhi keputusan yang diambil.

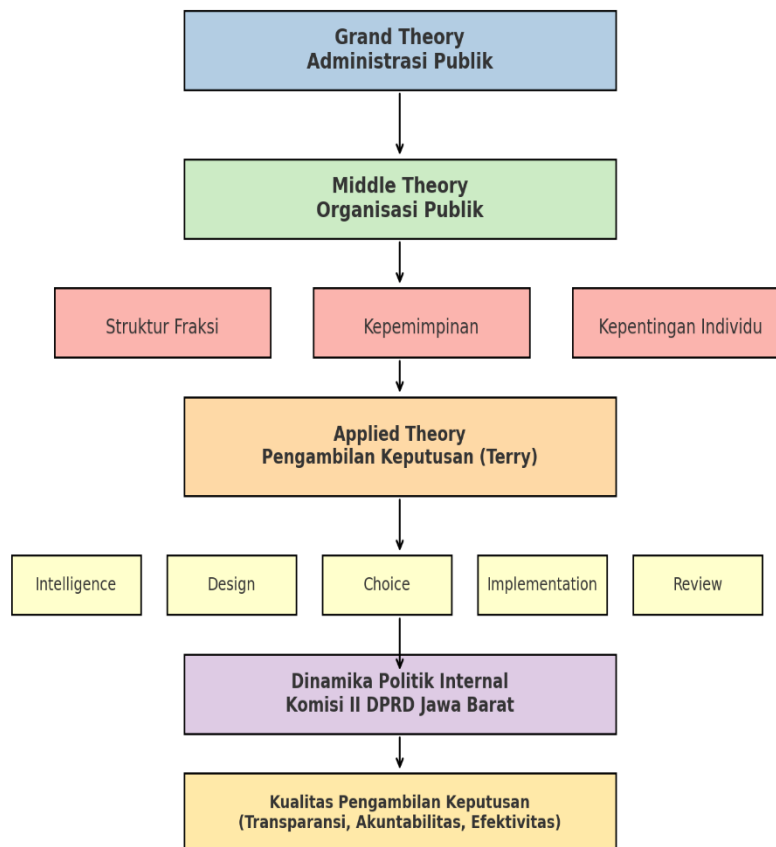
			4. Implementasi Keputusan (<i>Implementation Activity</i>) 5. Evaluasi dan Pengendalian (<i>Review Activity</i>)	
--	--	--	--	--

Sumber: (diolah peneliti, 2026)

Penulis juga membuat visualisasi kerangka pemikiran yang dibuat berdasarkan variabel terkait dengan masalah penelitian beserta teorinya, yaitu sebagai berikut :



Gambar 1.1
Kerangka Berpikir



Sumber: (diolah peneliti, 2026)